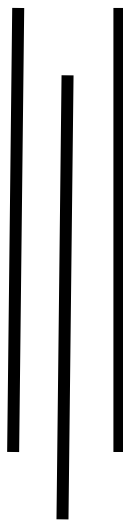


LAPORAN KINERJA (LKJ)
TAHUN 2024



KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

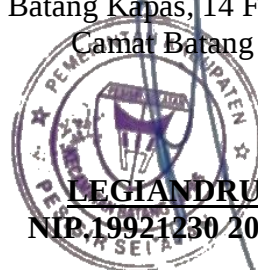
KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat kami selesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Tahun 2024 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Batang Kapas. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2024. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Batang Kapas kepada para stakeholders selama tahun 2024. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Batang Kapas dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Batang Kapas, 14 Februari 2025
Camat Batang Kapas,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kecamatan Batang Kapas menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu1(satu) tahun anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Batang Kapas sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp.2.310.967.934,- untuk mengelola sebanyak 5 program dan 10 kegiatan dengan 22 Sub kegiatan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai berikut :



Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Misi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai Akip Kecamatan Batang Kapas	Nilai	A (80,5)	80,34	99,80
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek kepuasan Masyarakat	%	85	90,20	106,12
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi Kecamatan	1	75	90	120
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan pemerintahan Nagari	Persentase nagari yang memiliki administrasi yang baik	Nagari	75 %	75	100
		Angaka Kemiskinan Eksrim	%	0 %	1,54	0
		Prevalensi Stanting (EPPGBM)	%	7 %	11,30	161,43
5	Meningkatnya Ketentraman dan Kestabilas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	%	80 %	70	87,50



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSKLUSIF		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud Tujuan	1
1.3.	Dasar Hukum	2
1.4.	Gambaran Umum Organisasi	3
1.5.	Sistematika Penyusunan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1.	Rencana Strategis	7
2.2.	Perjanjian Kinerja	11
2.3.	Indikator Kinerja Utama	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1.	Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	14
3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja	15
3.3.	Capaian Kinerja Kecamatan Batang Kapas	16
3.4.	Realisasi Anggaran	27
BAB IV	PENUTUP	30
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	30

Lampiran I Indikator Kinerja Utama

Lampiran II Penjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi

Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2024



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel	2.2.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas.....	12
Tabel	2.3.	Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan Batang Kapas.....	12
Tabel	2.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024.....	13
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	15
Tabel	3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024.....	15
Tabel	3.3.	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.....	17
Tabel	3.4.	Hasil Evaluasi LKj Batang Kapas Tahun 2022 s.d 2023	17
Tabel	3.5.	Realisasi Kualifikasi LKj Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022-2024	21
Tabel	3.6.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian LKj Kecamatan Batang Kapas 2022-2024	21
Tabel	3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	23
Tabel	3.8.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja, Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan Tahun 2022-2024.....	24
Tabel	3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	25
Tabel	3.10	Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3	25
Tabel	3.11	Realisasi Anggaran Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah “.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Dari penjelasan di atas maka diperlukan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pelaporan kinerja instansi pemerintahan pada penyelenggaraan pemerintahan pada tahun terkait.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas tahun 2024 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Batang Kapas;
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
5. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada public.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir selatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Perbup Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.4. Gambaran Umum

Kecamatan Batang Kapas adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibukota Pasar Kuok. Kecamatan Batang Kapas memiliki luas wilayah 277,54 km², yang terdiri atas 9 Nagari yaitu: Nagari IV Koto Hilie, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Taluk, Taluk Tigo Sakato, IV Koto Mudiek, Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Tuik IV Koto Mudiek dan Teratak Tempatih IV Koto Mudiek. Jumlah penduduknya 37.150 jiwa yang terdiri dari 18.557 laki-laki dan 18.593 perempuan. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Batas wilayah Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Jurai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sutura, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan.

Adapun tugas Kecamatan adalah:

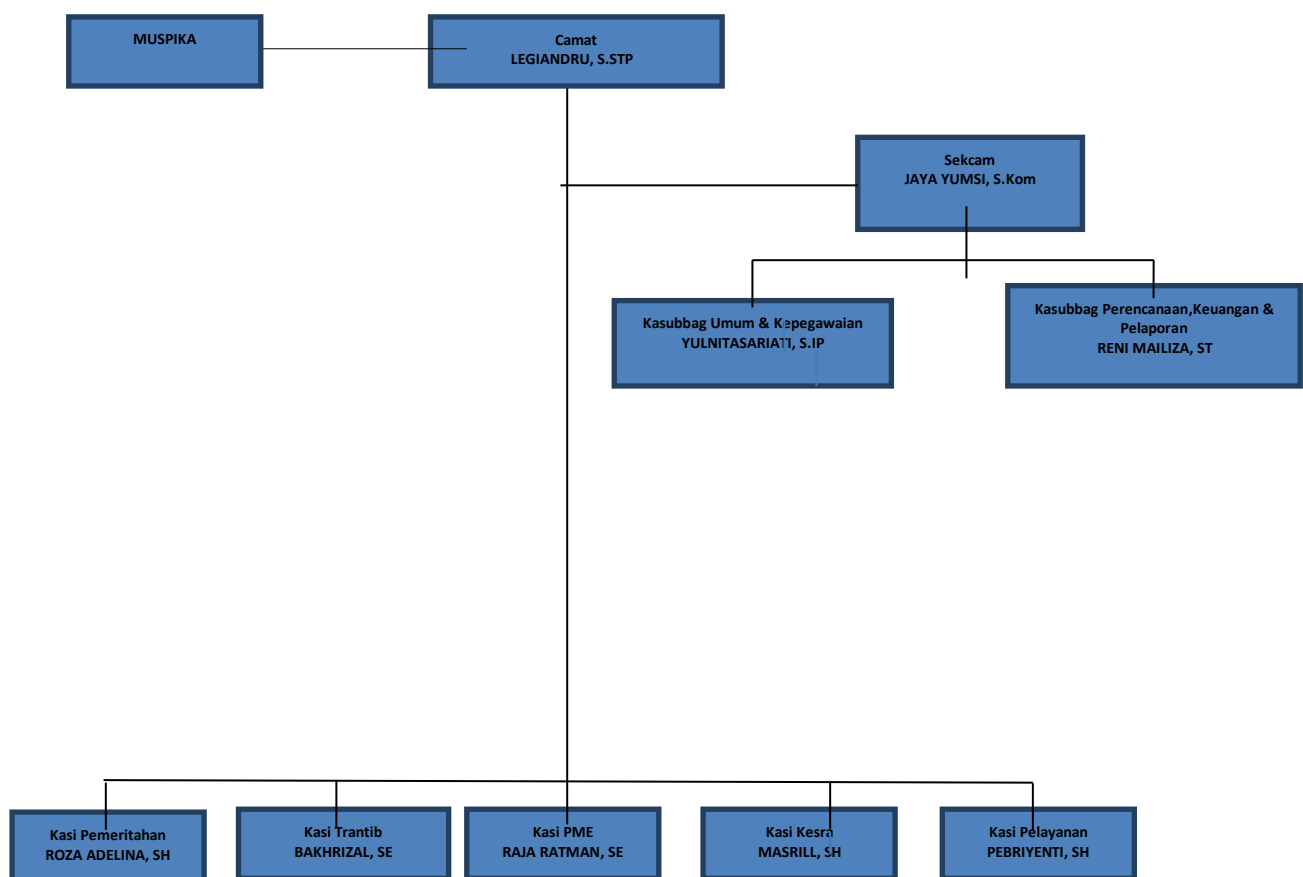
1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini ;

Gambar 1.1



1.6. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Batang Kapas adalah 14 orang dan 7 orang tenaga sukarela yang terdiri dari laki-laki sejumlah 13 orang dan perempuan 9 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Batang Kapas di bagi atas kondisi :

a. Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

- Golongan IV : 0 orang
- Golongan III : 13 orang
- Golongan II : 1 orang
- Sukwan : 7 orang
- Jumlah : 21 orang

b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2 : - orang
- Sarjana Strata1 : 16 orang
- D-3 : - orang
- SLTA : 5 orang
- SLTP : - orang
- Jumlah : 21 orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Batang Kapas terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon III a : 1 orang
- Eselon III b : 1 orang
- Eselon IV a : 5 orang
- Eselon IV b : 2 orang
- Jumlah : 9 orang

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Batang Kapas meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Gedung UDKP Kecamatan
3. Perkantoran Satu Atap
4. Ruang Kerja Camat
5. Ruang Kerja Sekretariat
6. Ruang Kerja Seksi

7. Ruang Operator Komputer dan data
8. Ruang Pelayanan
9. Toilet.
10. Tempat Parkir

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Roda empat 1 (satu) unit dengan rincian :
 - 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2017
2. Roda dua 1 unit dengan rincian :
 - 1 unit New Smash Tahun 2009

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain sebagaimana terdata dalam buku aset Kantor Camat Batang Kapas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan perencanaan sebagai berikut:

2.1 Rencana Strategis

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran

serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

2.1.1. Visi

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023 mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Kapas. Dimana tujuan pembuatan perencanaan kinerja lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan renja adalah berdasarkan kepada renstra kecamatan adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional

2.1.2. Misi

Adapun sasaran dari perencanaan kinerja Kecamatan Batang Kapas sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) di tingkat kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kecamatan
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel dan berkinerja
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan public
	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari
		Angka Kemiskinan ekstrim
		Rata-rata Prevalensi stunting di kecamatan (data EPPBGM)
	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 yang telah ditetapkan berpedoman pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Perjanjian kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,5)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85
3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	75
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi baik	75%
		Angka Kemiskinan ekstrim	0%
		Rata-rata Prevalensi stunting di kecamatan (data EPPBGM)	7%
5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	80%

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Batang Kapas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan telah mengacu pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN PENGUKURAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persen(%)	85
3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Nilai	70
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan Nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi baik.	Persen(%)	75
		Angka kemiskinan ekstrim	Persen(%)	0
		Rata-rata Prevalensi Stunting di Kecamatan (data EPPBGM)	Persen(%)	7

5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen(%)	85
---	---	--------------------------------------	-----------	----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024

NO	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Transparan						
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi						
1.1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas	Skala	A(80,5)	A (80,31)	99,80
1.2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,20	106,12
		Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	90	120
		Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja	%	75%	75%	100

		baik				
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	1,54%	0
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	7%	11,30	161,43
Misi 3 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, tentram dan Dinamis						
Tujuan 3 : - Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis						
3.1	Meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	70%	87,50
Rata-rata capaian indikator 2 Sasaran Strategis : 7 Indikator Kinerja						

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 7 (tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang kuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas	Skala	A (80,5)	A(80,31)	99,80

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.1 di atas dapat dilihat Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 masih menggunakan Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023 dikarenakan Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 belum tersedia. Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.2.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas	Skala	BB	A(80,10)	91,58	B(80)	A(80,13)	94,20	80 (BB)	A(80,31)	100,39

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 95,39%. pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Memuaskan**.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kecamatan Batang Kapas pada tahun 2021 realisasinya 80,10, tahun 2022 realisasinya 80,13 dan tahun 2023 adalah 80,31 dengan kategori A.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Renstra	Realisasi Renstra	Capaian Renstra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas	Skala	A	A	A	BB	BB	BB

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dikategorikan tinggi. Walaupun masih ada program kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2024 semua berjalan lancar.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas	Skala	A	A	A	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Sasaran kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu nilai hasil Evaluasi AKIP kecamatan Batang Kapas , Komponen Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi camat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rician laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023 penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.5
Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023

No	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		Komposisi yang Dinilai	Nilai	
		Bobot	2022		Bobot	2023
A	Perencanaan Kinerja	30,00	25,73	Perencanaan Kinerja	30,00	26,19
B	Pengukuran Kinerja	30,00	22,55	Pengukuran Kinerja	30,00	19,94
C	Pelaporan Kinerja	15,00	12,16	Pelaporan Kinerja	15,00	11,92
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,88	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,29
E						
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,31	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,34

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh pemerinth Kecamatan Batang Kapas berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/724/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja tahun 2023, diuraikan hasil evauasi AKIP Kecamatan Batang Kapas sebagai Berikut :

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 26,19;

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Nilai capaian 6,00 hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

Tujuan Renstra telah disertai target keberhasilan, namun perlu disinkronkan dengan indikator sasaran dan tujuan dalam program dan kegiatan.

2. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi standar yang baik dengan Nilai Capaian 8,78, yang perlu diperhatikan:

Dokumen Renstra belum seluruhnya dilakukan reviu secara berkala.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil uang berkesenambungan dengan Nilai sebesar 11,42

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 19,94;

1. Pemenuhan Pengukuran dengan Nilai Capaian 3,50 dimana telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja.

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan Nilai Capaian 7,93 hal yang perlu menjadi perhatian adalah: Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, penyesuaian stratedis dalam mencapai Kinerja yang efektif dan efisien dengan Nilai Capaian 8,51 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : IKU harus dimafaatkan seluruhnya dalam penilaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 11,92;

1. Pemenuhan Laporan dengan Nilai Capaian 3,00, yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

2. Penyajian Informasi Kinerja dengan Nilai Capaian 3,30 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi kinerja dalam laporan Kinerja belum dapat diandalkan.

3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja dengan Nilai Capaian 5,63 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 22,29:

1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Internal dengan Nilai Capaian 4,17 sudah ada kemajuan pencapaian kinerja serta hambatan yang telah terakomodir secara menyeluruh, dan evaluasi program serta rencana aksi telah tercapai sesuai dengan bobot yang di tentukan.
2. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan Nilai Capaian 7,50 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.
3. Implemen SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja OPD, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dengan Nilai Capaian 10,63 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja tindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan perbaikan serta peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) yang dilakukan terhadap Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat Batang Kapas beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 26,19;

1. Perencanaan Strategis agar memuat seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya, sehingga dalam kondisi tertentu target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD/Renstra.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan perlu ditingkatkan sebab dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun dan selaras dengan perjanjian kinerja yang telah disajikan dalam IKU.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 11,92;

1. Pemenuhan Pengukuran perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Kualitas Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah: agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Implementasi Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Agar IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
 - b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 11,92;

1. Pemenuhan Laporan yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
2. Penyajian Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Agar informasi kinerja dalam laporan Kinerja dapat diandalkan.
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 22,29:

1. Pemenuhan Evaluasi yang mana telah terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi, pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan, telah dilakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi serta hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.
2. Kualitas Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.

3. Pemanfaatan Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah :
Agar hasil evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.4
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas	Skala	A	A	100	2.310.967.934	2.080.861.847	90,04	9,96

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Jumlah Anggaran

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 9,96%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Umum

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.080.861.834 atau 90,04% dari total anggaran sebesar Rp. 2.310.1.972.162.391, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 9,96%.

Sasaran 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

A. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indek Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey di kantor Camat Batang Kapas pada periode Januari-Juni tahun 2024.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,81	106,83

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 85 dari target sebesar 90,81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,83% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \left\{ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right\} \times 100\%$$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 106,83%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pada perencanaan

renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	80	80	100	80	80	100	85	92,80	106,83

Sumber : Perencanaan dan Laporan tahun 2025

Dari tabel 3.3.8 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024 sebesar 106,83 % terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 Capaian Indikator kinerja sebesar 100% dan tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 termasuk kategori keberhasilan **Memuaskan**.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.9 dibawah ini :

Tabel 3.3.9
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,81	106,83	90	90,81	100,9

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Target pada Perjanjian Kinerja lebih rendah dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra. Walaupun terjadi perubahan target capaian namun dapat dicapai dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 dilakukan survey oleh kecamatan Batang Kapas .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.3.10 dibawah ini :

Tabel 3.3.10
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,81	106,83	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Pelayanan yang Tepat Waktu

1. Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
2. Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana

Nomor SOP tersebut, Nomor: 00.3.03.03/14/cmt-btkp/2023 yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2023.

3. Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 60 menit.
4. Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu adalah **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**, karena minimnya anggaran, maka kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan rutin kantor.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.10
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	90,8	106,83	2.310.967.934	2.080.861.847	90,04	9,96

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Jumlah Anggaran

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 9,96%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

IV. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Umum

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

B. Nilai Kematangan Inovasi kecamatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri dalam Negeri nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan system Inovasi daerah, dimana daerah dalam rangka peningkatan pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan penguatan system inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan.

.Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.12
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	90	120

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Batang Kapas mencapai 90 dari target 75 atau tingkat capaiannya mencapai 120%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja nyata Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 90 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120% atau melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 120%.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024 sebesar 120 % terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 Capaian Indikator kinerja sebesar 100% dan tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 termasuk kategori keberhasilan Sangat Memuaskan.

2. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.14 dibawah ini :

Tabel 3.3.14
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan
Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan
tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	90	120			

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 75% dengan capaian Cukup .

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

4. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Adanya Sinergitas OPD dalam Lingkup Pemerintah Kecamatan Batang Kapas sehingga dapat merumuskan inovasi terbaru di Kecamatan
- Adanya forum-forum yang telah terbentuk sehingga memudahkan perumusan inovasi-inovasi kecamatan

- Adanya dukungan dari Stekholder Kecamatan dan juga Pimpinan Daerah (Bupati) untuk terus berinovasi di Kecamatan Batang Kapas

Potensi Hambatan :

- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung dalam penerapan Inovasi yang telah dibuat.
- Belum adanya buku inovasi yang merupakan sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Batang Kapas

Sasaran Pemecahan :

- Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna peningkatan sumber daya yang ada.
- Perlunya Penyusunan data dan informasi terkait Inovasi sebagai sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Batang Kapas

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.15
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Kematangan Inovasi
Kecamatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	75	90	120	4.4.66.000	4.4.66.000	100	0

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi = $1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$

Jumlah Anggaran

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0%..

8. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.466.000 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp 4.466.000, sehingga efisiensi anggaran sebesar 0%.

C. Persentase Pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan Kinerja baik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik.

Penghitungan Realisasi Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Realisasi = $\frac{\text{Nagari yang Administrasi baik}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$

Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terdapat 9 Nagari dari 9 Nagari, sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.16
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	75	75	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Batang Kapas mencapai 75 dari target 75 atau tingkat capaiannya mencapai 100%.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 100%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.317 dibawah ini :

Tabel 3.3.17
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restras	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	75	75	100			

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari

ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.18
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Persentase Pemerintah Nagari
yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	75	75	100	25.132.500	16.536.400	65,80	34,20

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 34,20%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.536.400,- atau 65,80 % dari total anggaran sebesar Rp 25.132.500,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 34,20%.

D. Angka Kemiskinan Ekstrim

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan Ekstrim.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.19
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	1,54	0

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Batang Kapas mencapai 1,54 dari target 0 atau tingkat capaiannya mencapai 0%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Angka Kemiskinan Ekstrim terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.20 dibawah ini :

Tabel 3.3.20
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restrata	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0	1,54	0			

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Angka Kemiskinan Ekstrem sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 0% dengan capaian Sangat rendah .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrem Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batang Kapas dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terkait dengan dimensi:

a. Dimensi ekonomi

Telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial, meningkatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

b. Dimensi pendidikan

Kebijakan yang telah dilakukan adalah memfasilitasi PKBM, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sara pendidikan dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kampung melalui Nagari terkait

c. Dimensi kesehatan

Kebijakan yang telah dilaksanakannya itu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, memperbaiki gizi masyarakat dan meningkatkan upaya kesehatan lingkungan yang bekerja sama dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan Batang Kapas .

d. Dimensi prasarana dasar

Kebijakan yang telah dilakukan dan bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan,serta penyediaan air baku dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

e. Dimensi ketahanan pangan

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan Batang Kapas yang bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan jalan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian,perkebunan,peternakan serta perikanan, meningkatkan optimalisasi dan reklamasi lahan, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka penanganan raanpangan, meningkatkan prasarana dan prasarana lumbung pangan, menyusun regulasidi bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.21
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	1,54	0	4.466.000	4.466.000	100	0

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.466.000 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp.4.466.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0%.

E. Prevalensi Stunting (EPPGM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Prevalensi Stunting (EPPGM).

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	7	11,3	161,43%

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Batang Kapas mencapai 11,3 dari target 7 atau tingkat capaiannya mencapai 161,43%.

Untuk Pencapaian Realisasi Prevalensi Stunting (EPPGM) dengan memakai Rumus :

$$\text{Jumlah Realisasi} = 7\% \times \frac{\text{Jumlah Sisa Stunting}}{\text{Jumlah Stunting}}$$

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Prevalensi Stunting (EPPGM) terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	7	11,3	161,43			

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Prevalensi Stunting (EPPGM) sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 161,43% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Permasalahan dan Solusi Prevalensi Stunting Anak Balita yang Berkolaborasi dengan Puskesmas

- a) Perlu melakukan skrining anemia remaja putri dan pelaksanaan pemeriksaan HB yang dilengkapi dengan pemenuhan BMHP bagi pemeriksaan HB di Puskesmas.
- b) Belum optimalnya konsumsi TTD Rematri.
- c) Masih kurangnya SDM untuk mendukung penanganan stunting di puskesmas, terutama tenaga dokter, sanitarian, apoteker dan tenaga laboratorium

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	7	11,3	161,43	4.4.66.000	4.466.000	100	0

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.466.000 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp 4.466.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0%.

Sasaran 3 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis

terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	70	87,50%

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 masih menggunakan Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023 dikarenakan Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 belum tersedia. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Konflik yang diselesaikan terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	70%	87,50			

Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Target capaian Tahun 2024 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Konflik yang diselesaikan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 87,50% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	70%	87,50	-	-	-

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran ini diantaranya :

- Dukungan dana dari Stekholder untuk pelaksanaan program dan kegiatan KEcamatan Batang Kapas
- Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Batang Kapas

c) Dukungan warga Batang Kapas secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kecamatan Batang Kapas .

Beberapa permasalahan atau Tantangan yang dihadapi Kecamatan Batang Kapas dalam pencapaian sasaran perangkat daerah diantaranya yaitu

1. Heterogennya masyarakat Kecamatan Batang Kapas , sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya.
2. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kecamatan Batang Kapas yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
3. Mempertahankan Kecamatan Batang Kapas sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City Of Tolerance)

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	70%	87,50	35.831.000	28.359.400	79,15	24,85%

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Jumlah Anggaran

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 24,85%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 28.359.400 atau 79,15 % dari total anggaran sebesar Rp. 35.831.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 24,85%.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.2.310.967.934,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.080.861.847,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,04%.

Adapun realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.

Realisasi Anggaran Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		KET
			Rp	%	
I.	UNSUR KEWILAYAHAN	2.310.967.934	2.080.861.847	90,04	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.103.822	1.944.783.142	95,13	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.087.934	1.627.711.510	94,75	

		1.	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.701.967.934	1.570.691.510	92,28	
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.120.000	57.120.000	100,00	
	2.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.760.000	3.576.000	46,08	
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.880.000	1,540.000	39,69	
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.880.000	2.036.000	52,47	
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		233.883.740	181.972.682	77,80	
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.440.900	6.175.000	73,16	
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.111.870	18.000.000	99,38	
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.078.120	18.534.620	76,98	
		4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.002.750	8.957.162	74,63	
		5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	2.250.000	62,50	
		6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.400.000	14.776.200	95,95	
		7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.250.100	113.279.700	74,40	
	4.	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.226.207	22.800.000	83,74	
		1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.226.207	22.800.000	83,74	
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86.740.193	82.789.100	95,44	
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	10.094.100	84,12	
		2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.740.193	72.695.000	97,26	
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90.405.748	75.933.850	83,99	
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.507.248	33.234.850	86,31	
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.400.000	6.150.000	96,09	
		3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.498.500	36.549.000	80,33	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.434.612	36.716.905	90,81	
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		40.434.612	36.716.905	90,81	

		1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	40.434.612	36.716.905	90,81	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.466.000	4.466.000	100	
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		4.466.000	4.466.000	100	
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.466.000	4.466.000	100	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			35.831.000	28.716.400	79,15	
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		35.831.000	28.716.400	79,15	
		1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	22.784.0001	21.383.600	93,85	
		2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.047.000	6.975.800	53,47	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			25.132.500	16.536.400	65,80	
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		25.132.500	16.536.400	65,80	
		1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.132.500	16.536.400	65,80	
J U M L A H				2.310.967.934	2.080.861.847	90,04	

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.2.310.967.934,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.080.861.847,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,04%. Sisa anggaran sebesar Rp. 230.106.087,- atau 9,96%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Belanja daerah pada Kecamatan Batang Kapas tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.080.861.847,- atau 90,04% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.310.967.934,- Dari 5 (lima) program sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis terendah adalah “Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa” yaitu 65,80% dan tertinggi adalah “Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan” yaitu 100%.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan peninjauan kembali dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di pemerintahan kecamatan yang melibatkan seluruh lintas sektoral yang ada di kecamatan secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Batang Kapas dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
5. Diharapkan untuk tahun kedepan jumlah anggaran pada pemerintahan kecamatan lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

